

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KABUPATEN BOMBANA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Andi Selviana Safitri

NPP. 32.0921

*Asdaf Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara*

*Program Studi Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat*

Email: [32.0921@ipdn.ac.id](mailto:32.0921@ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Dr. Umar Nain, S. Sos., M.Si.

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *The Family Hope Program (PKH) in Bombana Regency aims to empower poor communities through targeted social assistance. However, despite the program's implementation, obstacles such as limited access to information, inadequate socialization, and insufficient infrastructure have hindered optimal empowerment outcomes. These challenges affect the ability of beneficiary families to fully realize the social, political, and psychological dimensions of empowerment, which are critical for sustainable poverty alleviation.*

**Purpose:** *This study aims to describe and analyze the empowerment of poor communities through the Family Hope Program (PKH) in Bombana Regency, identify the factors that hinder the program's implementation, and examine efforts made to overcome these challenges. **Method:** A qualitative descriptive approach was used, employing data collection techniques such as interviews, observations, and document analysis. Data were analyzed through processes of data reduction, data presentation, and decision-making/verifying to ensure comprehensive understanding. **Result:** The study found that the PKH program successfully fulfills the three fundamental dimensions of community empowerment: social power, political power, and psychological power. Nonetheless, the empowerment process is constrained by limited access to program information, insufficient socialization efforts, and infrastructure deficits. To address these barriers, strategies including improved communication and socialization, utilization of information technology, collaboration with local communities, and infrastructure enhancement have been implemented. **Conclusion:** The Family Hope Program (PKH) has effectively empowered poor communities in Bombana Regency as Beneficiary Families (KPM). However, further optimization is needed by addressing information accessibility, socialization quality, and infrastructure development. Recommendations are directed to the local government and social service agencies to strengthen these aspects for enhanced empowerment impact.*

**Keywords:** *Empowerment; Poverty; Family Hope Program (PKH); Bombana Regency*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Masyarakat miskin di Kabupaten Bombana menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang menghambat peningkatan kesejahteraan mereka. Program Keluarga Harapan (PKH) hadir sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin melalui bantuan sosial yang terstruktur. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan akses informasi, sosialisasi yang belum optimal, serta infrastruktur yang kurang memadai, yang menyebabkan pemberdayaan masyarakat belum maksimal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bombana, serta mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan program dan upaya

yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan/verifikasi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan PKH. **Hasil/Temuan:** Program Keluarga Harapan berhasil memberdayakan masyarakat miskin di Kabupaten Bombana dengan memenuhi tiga dimensi dasar pemberdayaan masyarakat, yaitu kekuatan sosial, kekuatan politik, dan kekuatan psikologis. Faktor penghambat utama dalam pemberdayaan ini meliputi keterbatasan akses informasi, sosialisasi program yang kurang efektif, dan infrastruktur yang tidak memadai. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain peningkatan komunikasi dan sosialisasi, pemanfaatan teknologi informasi, kolaborasi dengan komunitas lokal, serta perbaikan infrastruktur pendukung. **Kesimpulan:** Program Keluarga Harapan telah berkontribusi signifikan dalam memberdayakan masyarakat miskin di Kabupaten Bombana sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Namun, untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan, diperlukan optimalisasi akses informasi, sosialisasi yang lebih intensif, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung. Rekomendasi disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bombana dan Dinas Sosial agar terus memperkuat pelaksanaan program melalui pendekatan tersebut.

**Kata kunci:** Pemberdayaan, kemiskinan, Program Keluarga Harapan, Kabupaten Bombana

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi berbagai permasalahan ekonomi, salah satunya adalah kemiskinan yang masih sangat tinggi di kalangan masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan (BPS, 2023). Meskipun Indonesia telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam satu dekade terakhir, kemiskinan tetap menjadi tantangan besar, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang. Kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga terkait dengan kondisi sosial dan politik yang kompleks. Ketimpangan sosial, keterbatasan akses terhadap sumber daya, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya keterampilan menjadi faktor utama yang menghambat masyarakat keluar dari kemiskinan (Nain, 2017). Dampak kemiskinan meluas ke berbagai bidang kehidupan, seperti kesehatan, di mana kemiskinan dapat menyebabkan tingginya angka gizi buruk dan stunting. Di bidang pendidikan, anak-anak dari keluarga miskin seringkali terpaksa putus sekolah karena biaya atau harus membantu ekonomi keluarga. Selain itu, kemiskinan juga berdampak pada kualitas hidup secara umum, termasuk kondisi rumah yang tidak layak huni, sanitasi buruk, dan akses terbatas terhadap air bersih (BPS, 2023). Data dari BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia terus menurun, meskipun tantangan seperti inflasi dan dampak pandemi masih berpengaruh. Pada tahun 2023, angka kemiskinan nasional diperkirakan berkisar antara 9-10 persen (BPS, 2023). Namun, ketimpangan antar wilayah tetap signifikan, di mana daerah dengan akses terbatas pada pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Hal ini diperkuat oleh penelitian Hudang, Hariyanto, dan Handoyo (2024) yang menunjukkan bahwa keberhasilan program bantuan bersyarat seperti PKH sangat bergantung pada konteks lokal dan keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan. Kabupaten Bombana di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan kemiskinan serius. Masyarakat di Bombana sangat bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan yang rentan terhadap fluktuasi harga pasar dan perubahan iklim, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap kemiskinan. Meskipun Bombana kaya akan sumber daya alam, seperti pertambangan dan pertanian, masih banyak masyarakat yang hidup dalam

kondisi miskin akibat keterbatasan akses pada pendidikan dan layanan kesehatan (BPS Sultra, 2023). Hal ini menimbulkan siklus kemiskinan yang sulit diputus, karena rendahnya pendidikan dan keterampilan membatasi peluang kerja yang lebih baik (Nain, 2017). Menurut data BPS Sulawesi Tenggara tahun 2022-2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bombana tercatat sebanyak 19,21 ribu pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 20,52 ribu pada tahun 2023 (BPS Sultra, 2023). Faktor penyebab kemiskinan di Bombana antara lain: ketergantungan pada sektor primer yang rentan terhadap faktor eksternal; keterbatasan infrastruktur, terutama akses listrik, air bersih, dan layanan kesehatan di wilayah pedalaman; rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat; serta ketimpangan akses terhadap lahan, modal usaha, dan program pemerintah. Kondisi ini sejalan dengan temuan Sihotang dan Sihotang (2022) yang menekankan bahwa transformasi sosial dan peningkatan kebutuhan dasar dalam masyarakat miskin memerlukan dukungan program yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan komunitas secara menyeluruh. Penelitian oleh Dass, et al. (2022) di Kuala Lumpur juga menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan komunitas dalam upaya pengentasan kemiskinan perkotaan, menunjukkan bahwa pendekatan holistik yang mencakup dimensi sosial, politik, dan psikologis sangat krusial.

Sebagai upaya mengatasi kemiskinan, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007. PKH adalah program bantuan bersyarat yang memberikan dukungan keuangan kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan melalui akses pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial (Kementerian Sosial RI, 2024). Program ini berfokus pada pemutusan rantai kemiskinan antargenerasi dengan mendorong partisipasi aktif keluarga penerima manfaat, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Kriteria penerima PKH meliputi ibu hamil, anak usia dini, pelajar SD sampai SMA, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat (Kemensos RI, 2024). Salah satu keunggulan PKH adalah pendekatan berbasis komunitas melalui pendamping sosial yang berperan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat. Pendamping ini memberikan informasi, mendampingi keluarga penerima, serta mengajarkan pentingnya pendidikan dan kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat (Nain, 2017). Dengan bantuan bersyarat, PKH mendorong penerima untuk tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga aktif berusaha memperbaiki kualitas hidup dan memanfaatkan peluang pelatihan serta layanan kesehatan dan pendidikan. Hal ini sesuai dengan temuan Setiadi (2019) yang menunjukkan bahwa penerima manfaat PKH tidak hanya menerima bantuan finansial, tetapi juga mengalami peningkatan kapasitas dalam mengelola sumber daya rumah tangga sehingga berdampak positif terhadap kesejahteraan jangka panjang. Senada dengan itu, penelitian Badaruddin et al. (2020) menyoroti bagaimana pemberdayaan masyarakat desa melalui entitas seperti Badan Usaha Milik Desa yang berbasis modal sosial, mampu meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat, sebuah konsep yang relevan dengan upaya PKH dalam membangun kemandirian. Namun, pelaksanaan PKH di Kabupaten Bombana menghadapi berbagai tantangan, seperti stigma sosial terhadap penerima bantuan, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta keberagaman budaya masyarakat yang memerlukan pendekatan khusus agar program dapat diterima dengan baik (Dinas Sosial Kabupaten Bombana, 2023). Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan PKH sangat penting untuk mengukur efektivitas dan memberikan rekomendasi agar program ini lebih optimal dalam memberdayakan masyarakat miskin di Bombana. Penelitian ini bertujuan mengkaji pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bombana, sebagai salah satu strategi utama pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia (Hudang, Hariyanto, & Handoyo, 2024; Sihotang & Sihotang, 2022; Setiadi, 2019). Hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa PKH memiliki dampak positif pada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kapasitas penerima manfaat dalam mengelola sumber daya rumah tangga. Namun, sebagian besar studi masih bersifat umum dan lebih banyak difokuskan pada evaluasi dampak secara kuantitatif, dengan cakupan wilayah yang luas dan kurang mendalam menggali konteks spesifik di daerah-daerah dengan karakteristik sosial dan budaya yang unik, seperti Kabupaten Bombana. Kabupaten Bombana memiliki kondisi sosial ekonomi dan budaya yang khas, dengan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi serta keragaman etnis dan latar belakang masyarakat yang berpengaruh pada pelaksanaan program pemberdayaan. Meskipun pemerintah daerah bersama Dinas Sosial telah mengimplementasikan PKH dengan berbagai strategi pendampingan, masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas program, seperti stigma sosial, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan kesesuaian pendekatan dengan budaya lokal. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk menggali secara lebih mendalam bagaimana PKH diimplementasikan di tingkat lokal, bagaimana penerima manfaat merespons dan memanfaatkan program tersebut, serta sejauh mana program ini benar-benar memberdayakan masyarakat miskin di Kabupaten Bombana.

Selain itu, kesenjangan lain yang ditemukan adalah kurangnya studi yang secara khusus mengevaluasi peran pendamping sosial dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberhasilan PKH di wilayah terpencil. Penelitian yang ada juga belum banyak mengkaji secara holistik faktor-faktor penghambat dan pendukung keberlanjutan program dalam konteks lokal yang beragam. Hal ini penting untuk diperhatikan agar rekomendasi yang dihasilkan dapat memperbaiki strategi pelaksanaan PKH dan menjamin dampak jangka panjang yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin melalui PKH di Kabupaten Bombana, dengan pendekatan kualitatif yang mendalam untuk memahami dinamika pelaksanaan, tantangan, serta dampak sosial-ekonomi yang dirasakan oleh penerima manfaat dan pemangku kepentingan lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan komprehensif dan rekomendasi praktis bagi pengembangan program PKH agar lebih adaptif terhadap kebutuhan dan karakteristik masyarakat di daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi serta keberagaman sosial budaya yang kompleks.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Selain beberapa penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, sejumlah kajian terbaru turut memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman mengenai pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program sosial dan ekonomi. Sutiyo dan Fadhilah (2024) dalam karya mereka *Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat* menegaskan bahwa perlindungan sosial tidak dapat berjalan efektif tanpa disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat secara simultan. Mereka menggarisbawahi bahwa pemberdayaan yang bersifat partisipatif dapat mendorong masyarakat untuk menjadi subjek aktif dalam pemanfaatan bantuan sosial sehingga tercipta keberlanjutan dalam peningkatan kesejahteraan. Pendekatan ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat agar tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga mampu mengelola sumber daya yang ada secara mandiri. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Prihatini et al. (2024) mengenai program padat karya tunai desa di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara. Studi tersebut menunjukkan bahwa selain membantu memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek masyarakat, program padat karya tunai juga berperan signifikan dalam mempererat hubungan sosial antarwarga dan memperkuat modal sosial. Dengan demikian, pemberdayaan melalui program ini tidak hanya bersifat ekonomis, melainkan juga sosial, yang pada akhirnya membangun pondasi bagi keberlanjutan pembangunan desa. Temuan ini relevan untuk memahami bagaimana program-program sosial dapat memberikan dampak ganda yang positif dalam konteks pemberdayaan masyarakat

Sementara itu, penelitian oleh Azzikri dan Pitono (2024) yang membahas program bank

sampah di bawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup memberikan perspektif lain mengenai pemberdayaan masyarakat. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengumpulan dan pengelolaan sampah menjadi sumber penghasilan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam program ini menimbulkan kesadaran lingkungan yang lebih baik sekaligus membangun keterampilan baru yang mendukung ekonomi lokal. Pendekatan pemberdayaan yang berbasis lingkungan seperti ini menjadi contoh konkrit bagaimana program sosial dapat disinergikan dengan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Ketiga kajian tersebut melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang berfokus pada efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perpaduan antara perlindungan sosial dan pemberdayaan yang diusung oleh Sutiyo dan Fadhilah (2024), pendekatan ekonomi dan sosial dari Prihatini et al. (2024), serta integrasi pemberdayaan berbasis lingkungan oleh Azzikri dan Pitono (2024), memberikan kerangka teoritis dan praktis yang lebih kaya untuk memahami dinamika pemberdayaan masyarakat miskin. Hal ini juga memberikan gambaran bahwa keberhasilan program sosial tidak hanya diukur dari pemberian bantuan finansial semata, tetapi juga dari bagaimana masyarakat diberdayakan untuk berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya dan pengembangan kapasitas diri.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengadopsi pendekatan multidimensional dalam mengkaji pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bombana, yang tidak hanya menilai dari segi efektivitas bantuan, tetapi juga melihat faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat miskin, sebagaimana yang dipaparkan dalam kajian-kajian terdahulu tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan yang berkelanjutan.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari segi fokus, pendekatan, maupun konteks pelaksanaan program. Beberapa penelitian terdahulu banyak menitikberatkan pada efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, seperti yang dilakukan oleh Yulianti (2020), Harahap (2022), dan Nurhafifa (2022) yang lebih menekankan pada hasil program dan dampaknya terhadap penerima manfaat. Penelitian-penelitian tersebut sebagian besar menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk melihat sejauh mana program PKH dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, penelitian ini berbeda karena tidak hanya menilai efektivitas program PKH secara umum, tetapi secara khusus mengkaji aspek pemberdayaan masyarakat miskin melalui program tersebut di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Fokus pada pemberdayaan masyarakat sebagai bagian integral dari pelaksanaan PKH ini merupakan titik kebaruan yang signifikan, mengingat pemberdayaan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga peningkatan kapasitas, kemandirian, serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan sosial ekonomi.

Selain itu, penelitian ini juga memperluas analisis dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program, termasuk aspek sosial budaya, kebijakan lokal, dan peran serta pendamping program. Pendekatan multidimensional ini memberikan perspektif yang lebih holistik dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek kuantitatif atau dampak langsung dari program. Penelitian ini juga mengadopsi kerangka teori dan temuan dari kajian terbaru yang mengintegrasikan pemberdayaan berbasis perlindungan sosial, seperti yang diuraikan oleh Sutiyo dan Fadhilah (2024), serta pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui program-program inovatif lainnya (Prihatini et al., 2024; Azzikri & Pitono, 2024). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyumbang pada pemahaman akademik tentang PKH, tetapi juga memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif

terhadap konteks lokal dan kebutuhan pemberdayaan masyarakat miskin.

Secara keseluruhan, kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada penggabungan fokus pemberdayaan masyarakat miskin dalam pelaksanaan program PKH yang dilengkapi dengan analisis faktor-faktor pendukung dan penghambat yang bersifat kontekstual. Hal ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah dan memberikan landasan bagi pengembangan program sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Bombana.

### **1.5. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam dinamika sosial, proses, serta makna yang terkandung dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberdayakan masyarakat miskin di Kabupaten Bombana. Pendekatan kualitatif dianggap sesuai karena fokus utama penelitian ini bukan pada kuantifikasi data, melainkan pada pemahaman holistik terhadap fenomena yang diteliti dalam konteks kehidupan nyata masyarakat. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu dengan menetapkan informan yang dipandang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program PKH. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, karena memiliki kewenangan dan pemahaman strategis terhadap kebijakan dan implementasi program PKH di tingkat daerah. Selain itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Koordinator PKH Kabupaten Bombana, dan tim pendamping lapangan juga dipilih karena mereka merupakan pelaksana teknis yang memahami mekanisme operasional program. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilibatkan untuk memperoleh informasi langsung terkait dampak program terhadap kehidupan mereka.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang bertindak sebagai human instrument, didukung dengan pedoman wawancara. Penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Bombana serta beberapa kecamatan tempat pelaksanaan program PKH, termasuk Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Poleang. Penelitian ini berlangsung selama dua bulan, dimulai pada bulan Maret hingga April 2024. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penulis menggunakan teori Pemberdayaan Masyarakat menurut Menurut John Friedman (1992) yang mana terdapat 3 dimensi utamanya, yaitu Sosial, Politik, dan Psikologis. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### **3.1. Kekuatan Sosial**

Kekuatan sosial dalam konteks pemberdayaan masyarakat merujuk pada kemampuan individu atau kelompok dalam mengakses dan memanfaatkan berbagai sumber daya penting, seperti informasi, modal, pengetahuan, keterampilan, serta jaringan sosial. Dalam pembangunan sosial ekonomi, kekuatan ini memainkan peran penting karena berfungsi sebagai pendorong utama kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk nyata penguatan kekuatan sosial

adalah melalui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Di Kabupaten Bombana, program PKH telah dijalankan secara merata dan menyeluruh di seluruh kecamatan. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Bombana tahun 2024, berikut adalah rekapitulasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan PKH yang menunjukkan keberhasilan penyaluran bantuan secara merata:

Tabel 1. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan PKH Menurut Kecamatan di Kabupaten Bombana Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah KPM	Tersalurkan
Poleang Tengah	178	178
Kabaena	234	234
Kabaena utara	361	361
Kabaena Selatan	202	202
Kabaena Barat	598	598
Kabaena Timur	490	490
kabaena Tengah	289	289
Rumbia	339	339
Mata Oleo	823	823
Kep Masaloka Raya	249	249
Rumbia Tengah	258	258
Rarowatu	372	372
Rarowatu Utara	315	315
Mata Usu	55	55
Lantari Jaya	646	646
Poleang Timur	528	528
Poleang Utara	571	571
Poleang Selatan	430	430
Poleang Tenggara	322	322
Poleang	988	988
Poleang Barat	818	818
Tontonunu	350	350
Bombana	9.416	9.416

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bombana, 2024

Seluruh data di atas menunjukkan bahwa program PKH di Kabupaten Bombana telah menjangkau seluruh kecamatan secara menyeluruh, dengan jumlah bantuan yang sepenuhnya tersalurkan kepada masing-masing KPM. Hal ini mengindikasikan adanya pengelolaan yang transparan dan sistematis dalam penyaluran bantuan, serta mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat dimensi kekuatan sosial masyarakat miskin. Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana menegaskan bahwa proses verifikasi dan pembaruan data dilakukan secara berkala untuk menjaga akurasi dan ketepatan sasaran. Proses ini melibatkan pihak-pihak lokal seperti RT/RW dan tokoh masyarakat, yang berperan penting dalam mengidentifikasi keluarga miskin yang layak menerima bantuan. Kepala Dinas juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat agar pemahaman tentang program PKH semakin merata. Koordinator PKH Kabupaten Bombana juga menyampaikan bahwa dampak PKH sangat terasa dalam menurunkan kesenjangan sosial. Banyak keluarga yang sebelumnya mengalami keterbatasan ekonomi kini memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan

dan kesehatan. Bahkan, terdapat peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi pada pendidikan anak dan pemeliharaan kesehatan keluarga. Pernyataan serupa disampaikan oleh para KPM di beberapa kecamatan seperti Rumbia dan Tontonunu. Mereka menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah meringankan beban hidup mereka, khususnya dalam memenuhi biaya pendidikan dan kesehatan. Selain itu, para penerima merasa bahwa tidak ada kecemburuan sosial dari masyarakat sekitar, karena kondisi mereka diketahui dan dipahami oleh lingkungan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PKH di Kabupaten Bombana berhasil memperkuat kekuatan sosial masyarakat miskin. Program ini tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan dasar. Ini menjadi bukti bahwa kekuatan sosial sebagai salah satu pilar pemberdayaan masyarakat telah diterapkan secara efektif dan menyeluruh di daerah ini.

### 3.2. Kekuatan Politik

Kekuatan politik dalam konteks pemberdayaan masyarakat merujuk pada kemampuan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam keseluruhan proses program—dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek yang berhak untuk mengetahui, memahami, dan memberikan kontribusi terhadap jalannya program sosial yang dijalankan pemerintah. Penerapan konsep ini tampak jelas dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bombana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Mappatang, S.Pi, disampaikan bahwa keterlibatan penerima manfaat sangat penting dalam proses evaluasi program. Menurutnya, partisipasi langsung dari masyarakat memungkinkan pemerintah memperoleh informasi aktual tentang efektivitas program serta dampaknya terhadap kehidupan mereka. Senada dengan itu, Andi Sri Laela, S. Hut selaku Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, menjelaskan bahwa Dinas Sosial secara aktif membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, serta pertemuan langsung yang melibatkan para Koordinator PKH dan penerima manfaat.

Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga menciptakan hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perbaikan program. Bentuk nyata dari partisipasi masyarakat ini dapat dilihat pada Gambar 4.3, yang menunjukkan kegiatan pertemuan langsung dan pembinaan kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH. Melalui kegiatan seperti ini, pemerintah dapat mendengar langsung masukan dan keluhan dari masyarakat, sekaligus memberikan penjelasan yang dibutuhkan agar program berjalan tepat sasaran.

Gambar 1. Pertemuan langsung dan Pembinaan bagi Keluarga Penerima Manfaat Bantuan PKH



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bombana, 2024

Lebih lanjut, berdasarkan wawancara dengan Sudirman, salah satu tim pendamping

lapangan, partisipasi masyarakat dalam penyaluran bantuan di tiap kecamatan dinilai cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran tepat waktu dan kepatuhan masyarakat dalam mengikuti arahan. Pendamping lapangan juga secara rutin memberikan sosialisasi dan informasi untuk memastikan masyarakat memahami prosedur dan hak mereka sebagai penerima manfaat. Pengalaman dari penerima bantuan, seperti Bapak Tahang dan Ibu Tutti, juga menegaskan bahwa proses pengajuan dan evaluasi bantuan dilakukan secara transparan dan terbuka. Mereka merasa bahwa suara mereka cukup didengar, dan mereka turut dilibatkan dalam forum atau diskusi evaluatif untuk menyampaikan masukan dan pengalaman pribadi.

Secara keseluruhan, keterlibatan aktif masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam program PKH mencerminkan kekuatan politik yang sehat dalam pemberdayaan sosial. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat efektivitas program, tetapi juga meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap keberlanjutan program. Dengan pendekatan partisipatif ini, pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Bombana, berhasil membangun hubungan kemitraan yang strategis dengan masyarakat untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

### **3.3. Kekuatan Psikologis**

Kekuatan psikologis merupakan aspek penting yang menggambarkan tingkat kepercayaan diri individu maupun masyarakat dalam mengatasi masalah secara mandiri serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan kekuatan ini, masyarakat diharapkan mampu memimpin dan melaksanakan proses pemberdayaan secara mandiri, didukung oleh fasilitasi dari pihak luar. Prinsip ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perubahan lingkungan sosial mereka. Dinas Sosial Kabupaten Bombana mengimplementasikan prinsip ini dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dengan komitmen untuk meningkatkan kemandirian penerima manfaat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Mappatang, menyampaikan bahwa mereka fokus pada pendampingan intensif, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, serta peningkatan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan.

Monitoring dan evaluasi rutin juga dilakukan guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas program. Melalui upaya ini, penerima PKH tidak hanya bergantung pada bantuan, melainkan diharapkan dapat tumbuh menjadi keluarga yang mandiri secara sosial dan ekonomi. Pendapat serupa disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Andi Sri Laela, yang menambahkan bahwa pelatihan keterampilan, pendidikan kewirausahaan, dan manajemen keuangan menjadi bagian utama pemberdayaan. Pendampingan berkala juga membantu penerima manfaat mengoptimalkan pemanfaatan bantuan dan mendorong pengembangan usaha kecil, termasuk akses modal. Hal ini bertujuan mengurangi ketergantungan dan membangun kemandirian ekonomi berkelanjutan.

Koordinator PKH, Burhanuddin, menegaskan bahwa strategi peningkatan kapasitas dilakukan melalui kegiatan rutin seperti P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) dan diskusi kelompok, dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diajak berbagi pengalaman, belajar perencanaan keuangan, dan mengenal peluang usaha kecil. Instansi pelatihan juga dilibatkan agar materi yang disampaikan relevan dan praktis, sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri KPM dalam mengelola kehidupan ekonomi mereka. P2K2 sendiri diselenggarakan secara rutin, biasanya tiga sampai enam bulan sekali, dengan tempat pelaksanaan di balai desa atau rumah kader. Metode yang digunakan meliputi diskusi kelompok, tanya jawab, dan pemutaran video edukatif. Topik pembahasan mencakup gizi dan kesehatan keluarga, pendidikan dan pengasuhan anak, perencanaan keuangan keluarga, serta pengenalan wirausaha rumah tangga seperti kuliner, kerajinan, dan jasa kecil.

Gambar 2. Sosialisasi dan pelatihan kewirausahaan bagi Keluarga Penerima Manfaat bantuan PKH Kabupaten Bombana



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bombana, 2024

Pendamping lapangan seperti Sudirman mengungkapkan bahwa pendekatan pemberdayaan dilakukan secara personal dan memberdayakan, mulai dari membantu KPM mengenali potensi diri, menyusun perencanaan keuangan sederhana, hingga memotivasi mereka memulai usaha kecil. Kisah sukses sesama KPM juga kerap dibagikan sebagai inspirasi untuk membangun rasa percaya diri dan harapan. Namun, pemberdayaan ini tidak lepas dari tantangan terutama di daerah pelosok dengan akses transportasi yang sulit dan jaringan internet yang kurang memadai. Hambatan ini mengurangi efektivitas pelatihan dan pendampingan, sehingga Dinas Sosial perlu meningkatkan dukungan infrastruktur agar seluruh KPM dapat merasakan manfaat maksimal. Wawancara dengan beberapa KPM menunjukkan bahwa bantuan PKH sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar sekaligus memberikan dorongan psikologis untuk meningkatkan kualitas hidup. Mereka tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga aktif mengikuti pelatihan dan berusaha mandiri secara ekonomi.

Secara keseluruhan, program PKH di Kabupaten Bombana berhasil membangun kekuatan psikologis masyarakat penerima manfaat melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan berkelanjutan, yang berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. Penanganan hambatan di wilayah terpencil menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan capaian program ini.

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bombana menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan sosial, tetapi juga memiliki potensi signifikan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Temuan utama menunjukkan bahwa penerima manfaat PKH yang terlibat dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan sosial mengalami peningkatan kapasitas diri, kesadaran ekonomi, serta motivasi untuk mandiri secara finansial. Pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, seperti tergambar dalam Gambar 2, memberikan keterampilan dasar

yang memungkinkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mengembangkan usaha kecil, sehingga menciptakan peluang pendapatan baru di luar bantuan rutin dari PKH. Hasil ini sejalan dengan temuan Sutiyo dan Fadhilah (2024) yang menekankan bahwa perlindungan sosial harus disertai dengan upaya pemberdayaan partisipatif agar masyarakat tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan. Dalam konteks Kabupaten Bombana, integrasi program pelatihan dalam skema PKH terbukti menjadi langkah strategis untuk membangun kemandirian ekonomi KPM. Dengan demikian, PKH tidak hanya menjadi instrumen intervensi jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembangunan kapasitas masyarakat yang berkelanjutan.

Selain aspek ekonomi, aspek sosial juga menunjukkan perkembangan yang positif. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa interaksi antara KPM dan pendamping PKH mampu menciptakan ruang diskusi yang memperkuat modal sosial, solidaritas, dan saling percaya antarwarga. Ini menggemakan temuan dari Prihatini et al. (2024) yang meneliti program padat karya tunai desa. Mereka menemukan bahwa selain manfaat ekonomi, partisipasi masyarakat dalam program sosial dapat memperkuat hubungan sosial dan memperluas jaringan dukungan komunitas. Dalam konteks Bombana, pendekatan yang menggabungkan pelatihan, pendampingan, dan forum komunitas terbukti efektif untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan KPM dalam upaya keluar dari kemiskinan. Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga memperkuat pendekatan multidimensi terhadap pemberdayaan masyarakat. Salah satu contoh inovatif yang menjadi pembanding adalah studi Azzikri dan Pitono (2024) mengenai bank sampah. Meskipun berfokus pada isu lingkungan, program bank sampah tersebut menjadi medium pemberdayaan ekonomi sekaligus membentuk kesadaran kolektif masyarakat. Prinsip yang sama terlihat dalam implementasi PKH di Bombana, di mana KPM tidak hanya diberi bantuan, tetapi juga dimotivasi untuk bertransformasi menjadi pelaku usaha produktif, sekaligus berperan aktif dalam pembangunan komunitasnya. Temuan lain yang menarik adalah adanya kendala dalam aspek pelaksanaan, seperti keterbatasan jumlah pendamping PKH, akses informasi yang masih rendah di beberapa wilayah terpencil, serta resistensi awal dari sebagian penerima manfaat yang menganggap program hanya sebagai bantuan konsumtif. Namun, seiring berjalannya waktu, adanya pendekatan personal dan pendampingan intensif membantu mengubah pola pikir tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya kualitas interaksi antara pelaksana program dan masyarakat penerima untuk menjamin keberhasilan pemberdayaan.

Dengan mengacu pada temuan dan pembanding di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan PKH di Kabupaten Bombana tidak terlepas dari integrasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Program ini berjalan efektif ketika dikelola dengan prinsip partisipatif, berorientasi pada pengembangan kapasitas lokal, dan didukung oleh kelembagaan yang adaptif. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, pendekatan PKH di Bombana menonjol dalam sinergi antara aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan sebagai fondasi pemberdayaan yang berkelanjutan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bombana telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat miskin, tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga sosial, politik, dan psikologis. Program ini berhasil melampaui peran sebagai pemberi bantuan finansial dengan menjadi sarana transformasi sosial yang lebih luas. Dari aspek kekuatan sosial, PKH meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Bantuan finansial yang diberikan membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga penerima manfaat. Selain itu, interaksi sosial antar-Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperkuat melalui pertemuan rutin yang difasilitasi oleh pendamping sosial, meskipun tantangan dalam hal akurasi data penerima manfaat masih menjadi catatan penting. Dari sisi kekuatan politik, program ini mulai membuka ruang partisipasi masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan, khususnya terkait pemanfaatan bantuan. Masyarakat menunjukkan kesadaran yang meningkat terhadap hak dan kewajiban mereka,

walaupun sebagian KPM belum sepenuhnya mampu menyuarkan aspirasi secara maksimal. Dalam hal ini, peran pendamping sosial menjadi penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Sedangkan dalam aspek kekuatan psikologis, PKH memberikan dampak positif berupa peningkatan rasa percaya diri dan motivasi individu, terutama dalam mengelola kehidupan keluarga, menyekolahkan anak, dan memanfaatkan layanan kesehatan. Namun, pengembangan kapasitas individu masih perlu ditingkatkan, terutama melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan yang belum merata. Secara keseluruhan, pelaksanaan PKH di Kabupaten Bombana sudah mengarah pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Namun, sejumlah kendala masih ditemukan, seperti minimnya akses informasi, keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan program. Oleh karena itu, perlu penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan strategi pemberdayaan agar PKH dapat berfungsi lebih efektif dalam jangka panjang.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini hanya difokuskan pada Kampung Tematik Batik di Kelurahan Rejomulyo, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke kampung tematik lainnya. Pendekatan kualitatif yang digunakan juga belum mampu mengukur secara kuantitatif sejauh mana partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap keberhasilan program.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penelitian mendatang disarankan dilakukan di lokasi kampung tematik lain dengan pendekatan kuantitatif atau metode campuran, untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif dan menyeluruh terkait peran partisipasi dalam pengembangan kampung tematik berbasis budaya.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lurah Rejomulyo, Ketua Program Kampung Batik, warga, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam kelancaran penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anoanews.com. (2023). Dinas Sosial Bombana tingkatkan kesejahteraan masyarakat melalui PKH. Diakses dari <https://anoanews.com>
- Azzikri, & Pitono, A. (2024). Pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah De El Ha oleh Dinas Lingkungan Hidup. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. <http://eprints.ipdn.ac.id/16719/>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik kemiskinan Indonesia 2023*. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. (2023). Jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Sulawesi Tenggara 2022-2023. <https://sultra.bps.go.id>
- Badaruddin, B., Kariono, K., Ermansyah, E., & Sudarwati, L. (2020). Village community empowerment through village owned enterprise based on social capital in North Sumatera. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, 31(3), 163-175. <https://doi.org/10.1080/02185385.2020.1765855>
- Dass, M., Kunasekaran, P., Kaur, C., & Gill, S. S. (2022). Exploring the Role of Community Empowerment in Urban Poverty Eradication in Kuala Lumpur, Malaysia. *Sustainability*, 14(18), 11501. <https://doi.org/10.3390/su141811501>
- Dinas Sosial Kabupaten Bombana. (2023). *Laporan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bombana*. Dinas Sosial Bombana.
- Dinas Sosial Kabupaten Bombana. (2024). *Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan PKH Menurut Kecamatan di Kabupaten Bombana Tahun 2024*. Dinas Sosial Bombana.
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Blackwell.
- Harahap, M. (2022). Analisis Dampak Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan. *Universitas Medan Area*. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/18126>

- Hudang, A. K., Hariyanto, T., & Handoyo, R. D. (2024). Does conditional cash transfer deliver? The Indonesian evidence on PKH. *Business: Theory and Practice*, 25(2), 447–457. <https://doi.org/10.3846/btp.2024.13865>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). Program Keluarga Harapan: Panduan dan Kriteria Penerima Bansos PKH 2024. <https://kemensos.go.id>
- Nain. (2017). *Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*. PUSTAKA PELAJAR.
- Nurhafifa, A. (2022). Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Mabonta Kecamatan Burau. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. <https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5609/>
- Prihatini, J., Pratama, D., & Wijaya, I. M. A. (2024). Pemberdayaan masyarakat melalui program Padat Karya Tunai Desa di Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 4(5), 1405–1414. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1369>
- Setiadi, S. (2019). The benefits of conditional cash transfers: Learning from the recipients of PKH aid in Alor, East Nusa Tenggara. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 10(2), 161–172. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v10i2.16182>
- Sihotang, D., & Sihotang, M. M. (2022). Investigating the transformative impact of the Family Hope Program (PKH) on basic needs and community development in Pardomuan I Village, Pangururan District, Samosir Regency. *Law and Economics*, 16(1), 51–68. <https://doi.org/10.35335/laweco.v16i1.51>
- Sutiyo, & Fadhilah, H. A. (2024). *Perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat*. Penerbit Deepublish. <https://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1410/>
- Yulianti, R. (2020). Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4(2) <https://www.jurnal.stisipbp.ac.id/index.php/JIPE/article/view/109>

